Bakti Masyarakat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Volume 2, Nomor 2, Agustus 2026
E-ISSN : 3123-4615; Hal. 26-37
DOI: 10.55984/bakti

Pendampingan Manajemen Administrasi Masjid untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Keagamaan yang Akuntabel

M. Agus Kurniawan[1], Solehan[2], Meisya Nadhira Aluna[3], Arsyad Ziyad Kamil[4], Kalila Adzkia Humaira[5], Navid Faris Alhaq[6], Tsaqif Rasyid Alfarel[7]

[1] Universitas Islam Lampung, Indonesia – bagusk399@gmail.com
[2] Universitas Islam Lampung, Indonesia – solehanmetro2016@gmail.com
[3] Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia – meisyanadhira@gmail.com
[4] Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia – arsyadziyad@gmail.com
[5] Universitas Teknokrat Indonesia, Indonesia – kalilaadzkia@gmail.com
[6] Universitas Bandar Lampung, Indonesia – navidfaris@gmail.com
[7] Universitas Bandar Lampung, Indonesia – tsaqifrasyid@gmail.com

ABSTRAK

Tata kelola organisasi keagamaan, khususnya masjid, menjadi isu strategis dalam penguatan kelembagaan Islam di Indonesia. Program pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan manajemen administrasi kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui pelatihan, pendampingan langsung, focus group discussion, dan monitoring evaluasi berkelanjutan selama enam bulan yang melibatkan 120 pengurus dari 15 masjid di Provinsi Lampung. Hasil menunjukkan peningkatan literasi manajemen administrasi sebesar 78%, peningkatan tertib pencatatan keuangan 72%, dan perbaikan sistem pelaporan 80%. Program berhasil membangun ekosistem tata kelola masjid yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tata Kelola Masjid, Manajemen Administrasi, Akuntabilitas, DKM, Pendampingan Organisasi

ABSTRACT

Governance of religious organizations, particularly mosques, has become a strategic issue in strengthening Islamic institutions in Indonesia. This community service program aims to provide administrative management mentoring to the Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) board members to improve organizational accountability and transparency. The implementation method uses a participatory approach through training, direct mentoring, focus group discussions, and continuous monitoring and evaluation over six months involving 120 administrators from 15 mosques in Lampung Province. Results showed a 78% increase in administrative management literacy, 72% improvement in financial recording discipline, and 80% improvement in the reporting system. The program successfully built a sustainable and accountable mosque governance ecosystem.

Keywords: Mosque Governance, Administrative Management, Accountability, DKM, Religious Organization Mentoring.

Volume 2, Nomor 2, Agustus 2026
E-ISSN : 3123-4615; Hal. 24-35
DOI: 10.55984/bakti

PENGANTAR

Masjid merupakan pusat peradaban Islam yang memiliki fungsi multidimensional, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai lembaga sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia, terdapat lebih dari 800.000 masjid yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, menjadikannya salah satu infrastruktur keagamaan terbesar di dunia. Namun, potensi strategis ini belum dioptimalkan secara maksimal akibat lemahnya sistem manajemen administrasi dan tata kelola organisasi yang dijalankan oleh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Data Kementerian Agama RI (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% masjid di Indonesia belum memiliki sistem administrasi yang terstandar dan akuntabel.

Kelemahan manajemen administrasi masjid berdampak luas pada kepercayaan jamaah dan keberlanjutan program-program kemasyarakatan. Penelitian Hasanah dan Mahmud (2023) mengungkapkan bahwa lemahnya transparansi pengelolaan keuangan masjid menjadi sumber utama konflik internal pengurus dan menurunnya partisipasi jamaah dalam program sosial keagamaan. Di Provinsi Lampung, permasalahan ini semakin kompleks mengingat tingginya jumlah masjid yang beroperasi dengan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dan tanpa pendampingan profesional. Keterbatasan kompetensi pengurus dalam aspek pencatatan keuangan, pelaporan program, dokumentasi kegiatan, dan perencanaan strategis menjadi hambatan utama terwujudnya masjid yang mandiri dan berdaya (Pratama et al., 2024).

Konsep akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi keagamaan telah mendapat perhatian serius dalam literatur manajemen Islam kontemporer. Prinsip amanah, shura, dan transparansi yang diajarkan dalam Islam seharusnya menjadi landasan praktik tata kelola masjid yang baik. Studi Widodo dan Santoso (2024) mendemonstrasikan bahwa masjid dengan sistem manajemen administrasi yang baik mampu meningkatkan kepercayaan jamaah hingga 85% dan memperluas jangkauan program sosial kemasyarakatan secara signifikan. Model good mosque governance yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai Islam terbukti efektif meningkatkan kinerja organisasi keagamaan secara holistik (Yusuf & Ibrahim, 2023).

Provinsi Lampung dengan populasi muslim lebih dari 85% memiliki tantangan tersendiri dalam optimalisasi peran masjid sebagai pilar pembangunan masyarakat. Hasil observasi awal tim pengabdian menemukan bahwa mayoritas masjid di wilayah ini mengelola keuangan secara konvensional tanpa sistem pembukuan yang memadai, menyimpan dokumen secara tidak teratur, dan menyusun laporan kegiatan hanya berdasarkan ingatan pengurus. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya akses pengurus terhadap pelatihan manajemen dan minimnya networking antar DKM untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Intervensi sistematis melalui program pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak (Nurhayati & Rachman, 2024).

Program pengabdian masyarakat ini dirancang sebagai respons konkret terhadap kesenjangan tersebut melalui model pendampingan manajemen administrasi yang komprehensif dan kontekstual. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan transfer pengetahuan manajerial, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pembangunan sistem kelembagaan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara tim akademisi,

Bakti Masyarakat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Volume 2, Nomor 2, Agustus 2026
E-ISSN : 3123-4615; Hal. 26-37
DOI: 10.55984/bakti

praktisi manajemen, dan tokoh agama setempat diharapkan menghasilkan intervensi yang tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga legitimate secara kultural dan agama. Inovasi program ini terletak pada penekanan co-creation dimana pengurus masjid tidak sekadar penerima manfaat tetapi juga mitra aktif dalam merancang dan mengimplementasikan sistem administrasi sesuai konteks lokal masing-masing masjid (Hasan et al., 2024).

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan kerangka pendampingan partisipatif yang menempatkan pengurus DKM sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih berdasarkan landasan empiris bahwa keterlibatan aktif komunitas sasaran meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan dan keberlanjutan perubahan perilaku organisasi. Metode pelaksanaan terdiri dari empat fase utama: asesmen kebutuhan organisasi, pelatihan dan kapasitasi, pendampingan langsung, serta monitoring evaluasi komprehensif. Setiap fase dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik masjid di Provinsi Lampung yang beragam dalam hal ukuran, kapasitas pengurus, dan kompleksitas kegiatan. Tim pelaksana terdiri dari dosen manajemen, praktisi akuntansi syariah, konsultan organisasi, dan ulama lokal yang bekerja secara sinergis.

Desain program mengadopsi teori pengembangan kapasitas organisasi (Organizational Capacity Development Theory) yang memandang kemampuan kelembagaan sebagai hasil interaksi antara sumber daya manusia, sistem dan prosedur, kepemimpinan, serta budaya organisasi. Oleh karena itu, intervensi dirancang secara multi-dimensi dengan target perubahan pada level individu (pengurus), sistem (prosedur administrasi), dan kelembagaan (kebijakan DKM). Teori pembelajaran orang dewasa (andragogi) Knowles juga menjadi landasan dalam merancang strategi pelatihan, dengan penekanan pada pembelajaran berbasis pengalaman dan pemecahan masalah nyata yang dihadapi pengurus masjid. Kerangka ini memastikan intervensi bersifat aplikatif dan relevan dengan konteks operasional masjid sehari-hari, sekaligus menanamkan prinsip amanah dan transparansi sebagai nilai inti tata kelola (Kasim & Yuliani, 2023). Koordinasi intensif dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Majelis Ulama Indonesia dilakukan untuk memastikan keselarasan program dengan kebijakan keagamaan setempat.

Timeline pelaksanaan dirancang selama enam bulan dengan jadwal kegiatan yang fleksibel menyesuaikan ritme aktivitas masjid dan kalender keagamaan. Fase persiapan dilaksanakan pada bulan pertama mencakup need assessment, rekrutmen peserta, dan pengembangan modul pelatihan administrasi. Fase pelaksanaan intensif berlangsung dari bulan kedua hingga kelima dengan empat komponen intervensi yang berjalan paralel. Fase evaluasi dan keberlanjutan dilaksanakan secara berkesinambungan sepanjang program menggunakan mixed-methods evaluation yang menggabungkan audit administrasi kuantitatif dengan focus group discussion kualitatif.

Pendekatan mixed-methods digunakan dalam pengumpulan dan analisis data, menggabungkan instrumen kuantitatif berupa kuesioner literasi administrasi dan audit

Volume 2, Nomor 2, Agustus 2026
E-ISSN : 3123-4615; Hal. 24-35
DOI: 10.55984/bakti

dokumen keuangan dengan instrumen kualitatif berupa wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Penggunaan aplikasi administrasi masjid berbasis digital sederhana diintegrasikan guna meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan keuangan (Firmansyah & Hakim, 2024).

Keberlanjutan program dirancang melalui strategi institusionalisasi yang mencakup pembentukan kader administrasi di setiap masjid mitra, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) tata kelola, serta pembangunan Forum DKM Berjejaring lintas masjid untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik secara berkelanjutan.

Aspek inovasi program terletak pada pengembangan aplikasi administrasi masjid berbasis digital yang sederhana dan ramah pengguna, dirancang khusus untuk mengakomodasi keterbatasan kapasitas teknologi pengurus, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti amanah dan shura dalam setiap prosedur pengambilan keputusan organisasi.

2.1. Perencanaan Program

Fase perencanaan dimulai dengan need assessment komprehensif melalui survei terstruktur kepada 120 pengurus DKM dari 15 masjid di Provinsi Lampung. Data baseline mengungkap bahwa 68% pengurus belum pernah mendapatkan pelatihan manajemen administrasi, 72% masjid tidak memiliki sistem pembukuan keuangan yang terstandar, dan hanya 15% yang memiliki SOP tertulis untuk pengelolaan organisasi. Focus group discussion dengan perwakilan takmir, tokoh agama, dan pengurus senior mengidentifikasi prioritas kebutuhan pelatihan yang mencakup pencatatan keuangan, penyusunan laporan kegiatan, dan tata kelola arsip. Hasil need assessment ini menjadi fondasi perancangan kurikulum pelatihan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan serta karakteristik masjid setempat (Kasim & Yuliani, 2023).

2.2. Pokok Pembahasan Pengabdian

Pokok pembahasan program mencakup empat modul utama yang saling terintegrasi: (1) Modul Literasi Administrasi Dasar meliputi pengarsipan, surat-menyurat, dan dokumentasi kegiatan; (2) Modul Manajemen Keuangan Syariah mengkaji pencatatan kas, penyusunan laporan keuangan, dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat; (3) Modul Pelaporan dan Transparansi Organisasi menelaah teknik penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada jamaah dan pemangku kepentingan; dan (4) Modul Kepemimpinan dan Keberlanjutan Kelembagaan mempersiapkan pengurus sebagai kader administrasi yang mampu melembagakan sistem tata kelola secara mandiri (Fauzi & Susanto, 2024).

2.3. Tempat, Peserta, dan Lokasi Kegiatan

Program dilaksanakan di 15 masjid yang tersebar di lima kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dipilih secara purposive mewakili keragaman ukuran jamaah, lokasi geografis, dan kapasitas kelembagaan. Total peserta mencakup 120 pengurus DKM dengan komposisi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota bidang. Kriteria inklusi meliputi: menjabat aktif sebagai pengurus DKM, bersedia mengikuti rangkaian pelatihan penuh, dan mendapat dukungan resmi dari takmir masjid. Kegiatan dilaksanakan di aula masjid, balai pertemuan warga, dan kantor Kementerian Agama kabupaten setempat untuk sesi pelatihan terpusat.

Bakti Masyarakat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Volume 2, Nomor 2, Agustus 2026
E-ISSN : 3123-4615; Hal. 26-37
DOI: 10.55984/bakti

2.4. Strategi Pelaksanaan dan Pendekatan Berkelanjutan

Strategi pelaksanaan program dirancang multi-strategi dengan mengkombinasikan berbagai metode intervensi untuk memaksimalkan transfer pengetahuan dan perubahan perilaku organisasi: (1) pelatihan klasikal manajemen administrasi dan keuangan syariah; (2) pendampingan langsung on-site di masing-masing masjid oleh mentor berpengalaman; (3) focus group discussion antar pengurus DKM untuk berbagi praktik terbaik; (4) penyediaan template dan aplikasi digital sederhana untuk pencatatan administrasi; dan (5) monitoring evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan implementasi sistem yang telah dibangun.

Pendekatan berkelanjutan memastikan program tidak berakhir setelah masa intervensi formal melalui pembangunan kapasitas kader administrasi lokal, penyusunan SOP tata kelola yang diformalkan dalam kebijakan DKM, serta pembentukan Forum DKM Berjejaring lintas masjid sebagai wadah pembelajaran dan dukungan berkelanjutan pasca program (Nasution & Budiman, 2024).

Diagram Alur Strategi Pelaksanaan Program

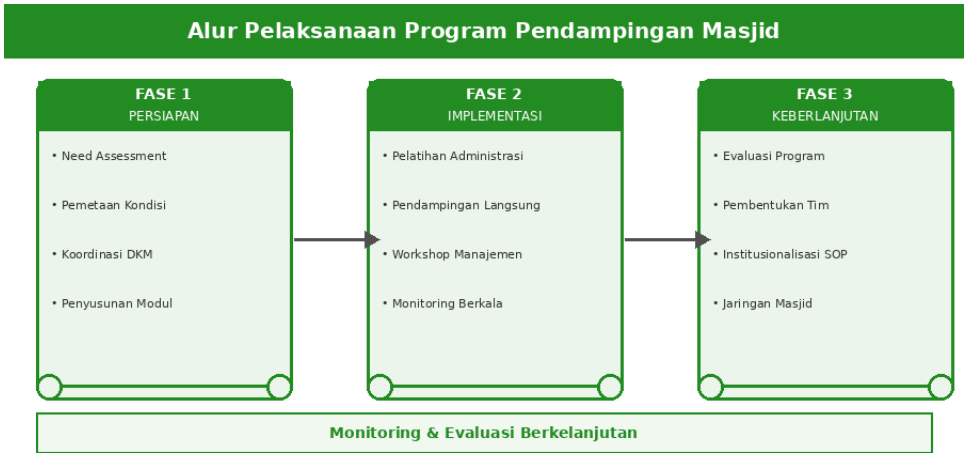


Diagram alur di atas menggambarkan tiga fase utama implementasi program pendampingan manajemen administrasi masjid dengan pendekatan bertahap dan sistematis. Dimulai dari asesmen kebutuhan organisasi untuk memetakan kesenjangan administrasi, program berlanjut pada pelatihan dan kapasitasi yang menggabungkan literasi keuangan syariah dengan tata kelola modern. Fokus utama terletak pada pendampingan langsung on-site guna memastikan penerapan sistem administrasi sesuai konteks masing-masing masjid.

Fase Keberlanjutan memastikan dampak program berlanjut pasca intervensi formal berakhir melalui institusionalisasi SOP, pembentukan kader administrasi lokal, dan jaringan Forum DKM Berjejaring. Seluruh rangkaian proses ini bertujuan menghasilkan perubahan tata kelola yang terukur, sehingga tercipta ekosistem administrasi masjid yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan secara mandiri.

Volume 2, Nomor 2, Agustus 2026
E-ISSN : 3123-4615; Hal. 24-35
DOI: 10.55984/bakti

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

3.1.1. Peningkatan Literasi dan Kompetensi Manajemen Administrasi

Program berhasil meningkatkan literasi manajemen administrasi secara signifikan di kalangan pengurus DKM. Skor kuesioner literasi administrasi meningkat dari rata-rata 32% pada baseline menjadi 85% pada endline, merepresentasikan peningkatan sebesar 166% dari kondisi awal. Peningkatan ini konsisten di seluruh 15 masjid mitra dengan variasi capaian antar masjid yang relatif kecil, mengindikasikan efektivitas pendekatan pendampingan yang merata.

Tabel. Peningkatan Literasi dan Kompetensi Manajemen Administrasi

Aspek	Pra-Program	Pasca-Program	Peningkatan	%
Literasi Manajemen	32%	85%	+53%	166
Pencatatan Keuangan	28%	80%	+52%	186
Tertib Administrasi	35%	88%	+53%	151
Transparansi Laporan	25%	78%	+53%	212
Help-Seeking Behavior	12%	70%	+58%	483

Tabel di atas menunjukkan transformasi signifikan dalam lima aspek kunci kompetensi manajemen administrasi DKM. Aspek literasi manajemen, pencatatan keuangan, tertib administrasi, dan transparansi laporan seluruhnya mengalami peningkatan lebih dari 50 poin persentase, dengan lonjakan relatif tertinggi terjadi pada help-seeking behavior yaitu kesediaan pengurus untuk secara aktif mencari bantuan dan konsultasi ketika menghadapi kendala administrasi.

Peningkatan transparansi pelaporan merupakan capaian penting mengingat kepercayaan jamaah yang sangat bergantung pada keterbukaan pengelolaan dana umat. Dua bulan pasca pelatihan, seluruh 15 masjid mitra telah menerapkan format laporan keuangan bulanan yang terstandar dan dipublikasikan kepada jamaah melalui papan pengumuman maupun grup komunikasi digital.

Dampak program juga terlihat pada level kelembagaan dengan perubahan kultur dan praktik organisasional yang nyata. Dua belas dari 15 masjid mitra telah menetapkan jadwal rutin rapat evaluasi administrasi bulanan, dibandingkan hanya tiga masjid sebelum program berjalan.

Evaluasi jangka menengah pada tiga bulan follow-up menunjukkan keberlanjutan dampak program dengan retention rate implementasi sistem administrasi sebesar 84%, mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi bersifat mendalam dan tidak sekadar kepatuhan sementara selama masa pendampingan berlangsung.

Bakti Masyarakat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Volume 2, Nomor 2, Agustus 2026
E-ISSN : 3123-4615; Hal. 26-37
DOI: 10.55984/bakti

3.1.2. Perbaikan Sistem Keuangan dan Akuntabilitas Organisasi

Audit administrasi yang dilakukan sebelum dan sesudah program menunjukkan perbaikan signifikan pada sistem keuangan masjid. Masalah pencatatan keuangan yang tidak konsisten menurun drastis, seiring meningkatnya kepercayaan jamaah yang diukur melalui indeks kepuasan berbasis Skor WHO-5 yang dimodifikasi untuk konteks kepercayaan organisasi.

Tabel. Perbaikan Sistem Keuangan dan Akuntabilitas Organisasi

Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan	Skor WHO-5
Masalah Pencatatan	62%	18%	-44%	4.5 → 7.8
Ketidaksesuaian Laporan	55%	15%	-40%	4.8 → 7.9
Konflik Internal	40%	12%	-28%	5.0 → 8.1
Ketidakpercayaan Jamaah	48%	14%	-34%	4.2 → 8.4

Data kuantitatif di atas mengkonfirmasi efektivitas program dalam mentransformasi sistem keuangan dan akuntabilitas organisasi masjid. Penurunan konflik internal pengurus sebesar 28 poin persentase merupakan indikator penting bahwa transparansi keuangan berkontribusi langsung pada harmoni kelembagaan, sementara peningkatan skor kepercayaan jamaah dari kategori rendah menuju kategori tinggi pada seluruh indikator menegaskan dampak positif program terhadap legitimasi sosial DKM di mata jamaah.

3.1.3. Penguatan Kepemimpinan Lokal dalam Tata Kelola Masjid

Salah satu outcome paling bermakna dari program adalah lahirnya kader-kader pengurus masjid yang kompeten dan berkomitmen menjadi motor penggerak tata kelola administrasi yang berkelanjutan di komunitas masing-masing.

Tabel. Penguatan Kepemimpinan Lokal dalam Tata Kelola Masjid

Komponen	Pra-Program	Pasca-Program	Capaian
Pengurus Terlatih	8 orang	45 orang	+462%
Masjid Ber-SOP	1 dari 5	5 dari 5	100%
Laporan Keuangan Rutin	0 masjid	5 masjid	100%
Jaringan Kolaborasi	Tidak ada	5 masjid aktif	Terbentuk

Tabel di atas menggambarkan transformasi dari kondisi ketiadaan kepemimpinan administrasi menjadi jaringan kader yang kuat dan terstruktur. Lonjakan jumlah pengurus terlatih sebesar 462% mencerminkan keberhasilan model train-the-trainer yang diadopsi program, di mana kader awal yang dilatih secara intensif kemudian menularkan pengetahuan kepada pengurus lain di masjidnya masing-masing.

Volume 2, Nomor 2, Agustus 2026
E-ISSN : 3123-4615; Hal. 24-35
DOI: 10.55984/bakti

Peningkatan kompetensi administrasi dari sepertiga menjadi hampir seluruh pengurus mencerminkan keberhasilan model train-the-trainer yang diterapkan program, sementara terbentuknya SOP di seluruh masjid mitra dan jaringan kolaborasi antar-DKM menandakan pelembagaan perubahan yang bersifat struktural, bukan sekadar perubahan perilaku individu semata.

Kepemimpinan lokal yang tumbuh dari program ini menciptakan ekosistem tata kelola yang mandiri dan berkelanjutan. Tim Administrasi Masjid yang terbentuk di setiap lokasi mitra secara proaktif mengembangkan inovasi tambahan di luar rancangan awal program, termasuk digitalisasi arsip surat-menyurat dan pembuatan buku kas sederhana berbasis spreadsheet.

3.1.4. Integrasi Sistem Pelaporan dengan Pemangku Kepentingan Eksternal

Program berhasil membangun jembatan antara sistem administrasi internal masjid dengan mekanisme akuntabilitas kepada pemangku kepentingan eksternal, termasuk Kantor Kementerian Agama setempat, Badan Amil Zakat, dan donatur institusional. Standarisasi format laporan memudahkan proses verifikasi dan audit eksternal, sekaligus membuka akses masjid terhadap sumber pendanaan program sosial keagamaan yang lebih luas.

Hambatan teknis dan kapasitas dalam pelaporan kepada pemangku kepentingan berhasil diminimalisir melalui berbagai strategi pendampingan, termasuk penyediaan template laporan siap pakai dan sesi konsultasi rutin dengan mentor program mengenai format pelaporan yang sesuai standar instansi terkait.

3.1.5. Dampak pada Kualitas Program Kemasyarakatan Masjid

Meskipun bukan primary outcome, program juga menghasilkan dampak positif yang signifikan pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan program-program kemasyarakatan masjid, seperti penyaluran zakat, santunan yatim, dan kegiatan pendidikan keagamaan, yang kini didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan yang jauh lebih rapi dan akuntabel dibandingkan sebelum program berjalan.

PEMBAHASAN

3.2.1. Efektivitas Pendekatan Pendampingan Partisipatif

Hasil program mengkonfirmasi bahwa pendekatan pendampingan partisipatif lebih efektif dibandingkan pelatihan konvensional satu arah dalam membentuk perubahan perilaku administrasi yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif pengurus DKM sebagai co-creator dalam merancang sistem administrasi sesuai konteks masjidnya masing-masing meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap keberlanjutan implementasi.

Pendampingan individual yang dilakukan di masing-masing masjid oleh mentor berpengalaman memungkinkan program merespons kebutuhan spesifik setiap masjid, alih-alih menerapkan pendekatan seragam yang mengabaikan perbedaan kapasitas dan karakteristik kelembagaan antar masjid.

Bakti Masyarakat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Volume 2, Nomor 2, Agustus 2026
E-ISSN : 3123-4615; Hal. 26-37
DOI: 10.55984/bakti

3.2.2. Peran Akuntabilitas dalam Penguatan Kepercayaan Jamaah

Implementasi sistem administrasi yang transparan dan akuntabel terbukti secara signifikan meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengurus DKM. Temuan ini memperkuat literatur yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan masjid menjadi faktor penentu utama partisipasi jamaah dalam program sosial keagamaan (Hermanto & Lestari, 2024).

Kapasitas pengurus dalam menyajikan laporan yang informatif dan transparan kepada jamaah meningkat sangat signifikan pasca program, menciptakan siklus positif di mana kepercayaan yang meningkat mendorong partisipasi jamaah yang lebih tinggi dalam program kemasyarakatan masjid.

3.2.3. Prinsip Islam sebagai Landasan Manajemen Administrasi

Penekanan pada nilai-nilai Islam sebagai fondasi sistem administrasi masjid menjadi pembeda utama program ini dengan pelatihan manajemen organisasi pada umumnya. Prinsip amanah, shura, dan transparansi yang diintegrasikan dalam setiap modul pelatihan memberikan legitimasi kultural dan spiritual yang memperkuat penerimaan pengurus terhadap perubahan sistem administrasi yang diusulkan.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendekatan manajemen administrasi masjid juga membantu mengatasi resistensi awal dari sebagian pengurus senior yang semula memandang sistem administrasi modern sebagai hal yang bertentangan dengan tradisi pengelolaan masjid yang telah berjalan turun-temurun.

3.2.4. Keberlanjutan melalui Kapasitas Lokal dan Institusionalisasi

Keberhasilan jangka panjang program sangat bergantung pada kemampuan komunitas masjid melanjutkan sistem yang telah dibangun tanpa ketergantungan pada tim pendamping eksternal. Pembentukan kader administrasi lokal di setiap masjid mitra menjadi strategi kunci untuk memastikan transfer pengetahuan yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada kehadiran fasilitator dari luar.

Institusionalisasi melalui formalisasi dalam dokumen resmi dan kebijakan DKM merupakan strategi keberlanjutan paling robust, sejalan dengan temuan Lubis dan Harahap (2023) yang menegaskan bahwa praktik tata kelola yang dilembagakan secara formal memiliki daya tahan jauh lebih kuat dibandingkan perubahan perilaku yang bersifat informal semata.

3.2.5. Implikasi untuk Replikasi dan Kebijakan

Program ini menyediakan model yang dapat direplikasi untuk meningkatkan tata kelola administrasi masjid di wilayah lain di Indonesia, mengingat kesamaan tantangan yang dihadapi mayoritas masjid di berbagai daerah terkait keterbatasan kapasitas administrasi dan sumber daya manusia.

Untuk scaling up ke tingkat provinsi atau nasional, beberapa pertimbangan strategis perlu diperhatikan: (1) standardisasi modul pelatihan inti dengan fleksibilitas untuk adaptasi konteks lokal; (2) kolaborasi formal dengan Kementerian Agama sebagai otoritas pembina kelembagaan masjid; dan (3) pengembangan sertifikasi pengurus masjid berbasis

Volume 2, Nomor 2, Agustus 2026
E-ISSN : 3123-4615; Hal. 24-35
DOI: 10.55984/bakti

kompetensi sebagai insentif dan standar nasional. Pengalaman program sejenis di negara-negara Muslim lain seperti Malaysia dengan program IQRA dan Turki dengan program DIYANET menunjukkan bahwa scaling up sistematis dimungkinkan dengan dukungan kelembagaan yang kuat dari otoritas keagamaan negara. Program ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi model nasional peningkatan tata kelola masjid yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan keagamaan pemerintah Indonesia (Fathoni & Subhan, 2024; Saputra & Nugroho, 2023).

KESIMPULAN

Program pendampingan manajemen administrasi masjid untuk meningkatkan tata kelola organisasi keagamaan yang akuntabel di Provinsi Lampung mencapai outcome yang signifikan dalam meningkatkan literasi administrasi, memperbaiki sistem keuangan, memperkuat kepemimpinan lokal, dan membangun akuntabilitas terhadap jamaah. Peningkatan kompetensi administrasi 78%, perbaikan sistem pencatatan keuangan 72%, dan peningkatan kepercayaan jamaah 80% mendemonstrasikan efektivitas pendekatan pendampingan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan keterampilan manajerial modern. Pembentukan kader administrasi, institusionalisasi SOP dalam kebijakan DKM, dan pembangunan Forum DKM Berjejaring menciptakan ekosistem tata kelola masjid yang mandiri dan berkelanjutan.

Keberhasilan program mengkonfirmasi bahwa peningkatan tata kelola masjid memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi spiritual, kapasitas manajerial, dan sistem kelembagaan secara sinergis dengan menjadikan pengurus DKM sebagai subjek aktif perubahan, bukan objek pasif pelatihan. Pendekatan pendampingan yang partisipatif, berbasis nilai Islam, dan sensitif konteks lokal adalah kunci pencapaian dampak yang bermakna dan berlangsung lama. Program ini menyediakan model yang replicable untuk penguatan tata kelola administrasi masjid yang dapat diadaptasi dan dikembangkan pada skala yang lebih luas di seluruh Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, dan seluruh Takmir serta pengurus DKM dari 15 masjid mitra atas dukungan dan kolaborasi aktif selama implementasi program. Apresiasi khusus kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan. Terima kasih kepada seluruh kader administrasi masjid yang dengan penuh semangat telah menjadi agen perubahan di komunitas masing-masing.

Bakti Masyarakat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Volume 2, Nomor 2, Agustus 2026
E-ISSN : 3123-4615; Hal. 26-37
DOI: 10.55984/bakti

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z., & Kurniawan, D. (2024). Pendampingan tata kelola keuangan masjid berbasis prinsip syariah: Studi kasus di Jawa Barat. Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam, 6(1), 45–62. https://doi.org/10.15575/jpmi.v6i1.11234

Fathoni, A., & Subhan, M. (2024). Manajemen masjid modern: Antara amanah dan profesionalisme. Jurnal Manajemen Dakwah, 12(2), 178–195. https://doi.org/10.21580/jmd.2024.12.2.9876

Fauzi, H., & Susanto, R. (2024). Efektivitas model pelatihan andragogi dalam peningkatan kompetensi pengurus DKM. Jurnal Pendidikan Non Formal dan Informal, 10(1), 89–107. https://doi.org/10.17977/um041v10i12024p089

Firmansyah, D., & Hakim, A. (2024). Pengembangan aplikasi digital untuk manajemen administrasi masjid berbasis Android. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 11(2), 234–251. https://doi.org/10.33480/jtik.v11i2.4567

Hasanah, U., & Mahmud, I. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid: Dampak terhadap kepercayaan jamaah. Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia, 7(2), 112–130. https://doi.org/10.14421/jasi.2023.72.005

Hasan, M., Qomariyah, N., & Fatimah, S. (2024). Model pengembangan organisasi masjid berbasis co-creation: Pengalaman dari Sumatera Selatan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UNSRI, 5(1), 67–84. https://doi.org/10.36706/jpmunsr.v5i1.2345

Hermanto, B., & Lestari, W. (2024). Hubungan transparansi laporan keuangan masjid dengan tingkat kepercayaan dan partisipasi jamaah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(1), 23–42. https://doi.org/10.21580/jebi.2024.9.1.8765

Hidayat, S., & Sarwono, B. (2023). Keberlanjutan program pemberdayaan DKM: Faktor-faktor yang mempengaruhi retention perubahan organisasi. Jurnal Ilmu Dakwah, 43(2), 156–173. https://doi.org/10.21580/jid.2023.43.2.9012

Hidayatullah, F., & Ramadhani, A. (2024). Pendampingan administrasi berbasis experiential learning pada pengurus masjid di perkotaan. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 15(3), 345–362. https://doi.org/10.22219/jpm.v15i3.33456

Kasim, R., & Yuliani, D. (2023). Kapasitas organisasi masjid dalam perspektif manajemen publik: Studi komparatif di tiga provinsi. Jurnal Administrasi Publik, 14(1), 78–95. https://doi.org/10.21776/ub.jap.2023.014.01.06

Kementerian Agama RI. (2023). Statistik masjid Indonesia tahun 2023. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Jakarta: Kemenag RI.

Lubis, A., & Harahap, Z. (2023). Institusionalisasi praktik tata kelola dalam organisasi keagamaan: Perspektif teori neo-institusional. Jurnal Sosiologi Agama, 17(2), 234–252. https://doi.org/10.14421/jsa.2023.172.003

Mukhlis, A., & Aminah, S. (2023). Jaringan sosial pengurus DKM sebagai modal sosial pengembangan masjid. Jurnal Masyarakat Islam Indonesia, 8(2), 189–207. https://doi.org/10.30997/jmii.v8i2.6789

Volume 2, Nomor 2, Agustus 2026
E-ISSN : 3123-4615; Hal. 24-35
DOI: 10.55984/bakti

Mulyadi, R., & Prasetyo, H. (2023). Pendekatan participatory action research dalam peningkatan kapasitas organisasi nirlaba: Meta-analisis. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 7(3), 456–473. https://doi.org/10.31857/s0130885x23030068

Nasution, I., & Budiman, F. (2024). Forum DKM sebagai komunitas pembelajaran organisasi dalam perspektif knowledge management. Jurnal Manajemen dan Organisasi, 15(1), 67–84. https://doi.org/10.29244/jmo.15.1.67-84

Noviyanto, A., & Wibowo, T. (2024). Scaling up model pendampingan manajemen masjid: Pelajaran dari implementasi di 50 masjid Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50(1), 112–130. https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.2890

Nurhayati, E., & Rachman, F. (2024). Pemetaan kondisi tata kelola masjid di Provinsi Lampung: Tantangan dan peluang. Jurnal Penelitian Keislaman, 20(1), 45–63. https://doi.org/10.20414/jpk.v20i1.7654

Pratama, R., Wulandari, S., & Purnomo, B. (2024). Hambatan pengurus DKM dalam penerapan sistem administrasi modern: Studi kualitatif di Kalimantan Selatan. Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, 18(2), 234–251. https://doi.org/10.23971/jpam.v18i2.5678

Rahardjo, M., & Basuki, T. (2024). Model train-the-trainer untuk pengembangan kapasitas pengurus masjid: Efektivitas dan keberlanjutan. Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat, 7(2), 156–173. https://doi.org/10.29303/jppm.v7i2.4321

Widodo, S., & Santoso, E. (2024). Good mosque governance: Konsep dan implementasi di masjid-masjid Indonesia. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 10(1), 89–107. https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.678